



BIBLIOGRAPHY

A. Books

Arief, Barda Nawawi. 2018. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Prenadamedia Group. Jakarta.

Arief, Barda Nawawi. 2014. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Prenadamedia Group. Jakarta.

Eddyono, Sri Wiyanti, 2016, When and Why the State Responds to Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia, UNRISD Publication, Switzerland.

Fajar&Achmad, 2010 "Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Pustaka Penerbit, Jakarta.

Gosita, Arif. 1993, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), Akademika Pressindo, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S. 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.

Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017, Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait Kekerasan Seksual,

Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019, Catatan Tahunan Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan, 2020, Elemen kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual concerning Recovery.

Komnas Perempuan, 2020, Elemen kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual concerning Criminal Procedure.

Komnas Perempuan, 2020, Elemen kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual concerning Nine Types of Sexual Violence.

Komnas Perempuan, 2020, Elemen kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual concerning Prevention.

Komnas Perempuan, 2020, Elemen kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual concerning Monitoring.



Komnas Perempuan, 2020, Elemen kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual concerning Criminal Provisions.

Komnas Perempuan, 2018, Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: SPPT-PKKTP, Jakarta.

Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait Kekerasan Seksual.

Komisi VIII DPR RI, Rapat Meminta Masukan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Substansi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Hukum Acara dan Ketentuan Pidana.

Mertokusumo, Sudikno., Teori Hukum, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2006, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.

Suryo Utomo, Tomi. 2018, Legal Research: After Mid Semester Material.

Widiartana, Dr. G. 2015, Viktimologi, Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

William D. Murphy, Management and Treatment of the Adult Sexual Offender, Sexualized Violence against Women and Children.

Yulia, Rena. 2010, Viktimologi (perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan), Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. Journal

Ali, Salim Ibrahim, Yusoff, Zurhati Mohammed, Ayub, Zainal Amin. Legal Research Doctrinal and Non-Doctrinal. International Journal of Trend in Research and Development, V4(1), 2017.

Eddyono, "RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Berbasis Gender", Jurnal Perempuan, Vol. 64, No. 23 (2)

Komnas Perempuan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai UU yang Mengatur Tindak Pidana Khusus. Vol. 1.

Komnas perempuan, Menuju System Peradilan Pidana yang Menjauhkan Korban dari Viktimisasi Melalui RUU PKS. Vol 2.

Kusuma, Agnes. Manurung,, Gracia Putri. Rais, Natasya Fila. 2019, "Analisis



Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual, Jurnal Lex Scientia Law Review” Vol. 3 No. 1,

Nurherwati, SH. Peta Kekerasan Seksual dan Penanganannya di Indonesia, Komnas Perempuan. Analisis keberlakuan RUU PKS dan RKUHP.

Prof. Dr. H. Nandang Alamsyah Delianoor, Dr. Sigid Suseno, Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, HKUM4309/ Modul. 1.

Ramadhani, Granita. “Metode Penelitian Hukum. FH UI”.

Simion, Kristina, 2016, “Qualitative and Quantitative Approaches to Rule of Law Research”, International Network to Promote the Rule of Law (INPROL).

Shinta Agustina, 2015, “Implementasi Asas Lex Specialis Derigat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal MMH Vol.44 No.4, Universitas Andalas.

A. Internet

Eddyono, Sri Wiyanti “Dilema Reformasi Hukum Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban”. Retrieved on <https://kompas.id/baca/opini/2019/08/21/dilema-reformasi-hukum-kekerasan-seksual-dan-perlindungan-korban>. Accessed on 8 December 2019.

United Nations Office in Drugs and Crime . “United Nations Office Effective Prosecution Responses to Violence against Women and girls”, available at https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Gender/16-09583_ebook.pdf , accessed 15 Oct 2019.

Komnas Perempuan. 15 Bentuk Kekerasan Seksual. Retrieved on https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedom an/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf. Accessed on 12 November.

Laporan Singkat RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Available at <http://www.dpr.go.id/prolegnas/rekam-jejak/id/180>, retrieved on 3 December 2019.

National Sexual Violence Resource Center, 2010.

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Available at <http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/180>, retrieved on 3 December 2019.

Shinta Agustina, 2015, Implementasi Asas Lex Specialis Derigat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal MMH Vol.44 No.4, Universitas



Andalas, retrieved [https://media.neliti.com/media/publications/179264-ID-
implementasi -asas-lex-specialis-derogat.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/179264-ID-implementasi-asas-lex-specialis-derogat.pdf), accessed on 4 November 2019.

United Nations Office in Drugs and Crime, Victim Assistance and Witness Protection. Retrieved August 23.

UNODC Response, 2019, Victim Assistance and Witness Protection, retrieved on <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/witness-protection.html>, accessed on 15 October 2019.

World Report on Sexual and Health, Journal Chapter. 6 Sexual Violence, retrieved on [https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_
campaign/en/chap6.pdf](https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf). Accessed on 5 November 2019.

C. Laws

Bill on The Elimination of Sexual Violence

General recommendation No.35 on Gender based Violence.

Law on 1945 Indonesian Constitution

Law on Indonesian Criminal Code

Law No. 21/ 2007 concerning the Elimination of Trafficking on Person

Law No. 13 of 2006 Concerning Protection of Witness and Victims

Law No.8 of 1981 on criminal procedural law;

Law No. 23 of 2004 concerning The Elimination of Domestic Violence;

Law No. 23 of 2002 that has been revised with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection.



APPENDICES

1. *Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Komisi VIII DPR RI*
2. *Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Komisi III DPR RI*
3. *Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*
4. *Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di LBH APIK Jakarta*
5. *The Script of Interview with Komisi VIII DPR RI*
6. *The Script of Interview with Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*
7. *The Script of Interview with LBH APIK Jakarta*